

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Negara merupakan tempat berkumpulnya setiap insan manusia untuk meneruskan dan mengembangkan setiap langkah hidupnya namun tetap berpegang pada hukum yang berlaku. Menurut Miriam Budiardjo, terciptanya suatu negara harus memenuhi beberapa unsur dalam pembentukan negara itu sendiri, diantaranya wilayah, warga negara, pemerintah yang sah dan kedaulatan (Budiardjo, 2001). Adanya wilayah, Pemerintahan yang sah, warga negara dan kedaulatan yang sah menjadi empat syarat mutlak yang harus ada dalam keberadaan suatu negara.

Pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang mengutamakan kedaulatan serta kemakmuran warga negaranya itu sendiri. Buah dari berjalannya suatu sistem demokrasi di Indonesia adalah dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam setiap pemilihan umum atau disebut dengan partisipasi politik. Masyarakat boleh memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dalam melaksanakan suatu pemerintahannya nanti, baik dalam ruang lingkup daerahnya sendiri maupun pemimpin negara yaitu presiden.

Partisipasi politik selalu berkaitan dengan kepercayaan terhadap suatu lembaga pemerintahan, legitimasi serta proses demokrasi yang ada di Indonesia. Partisipasi politik menuntut dan mengharuskan kita sadar akan pentingnya berpolitik dan harus ikut terjun di dalamnya. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1976:4) Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Menurut Budiardjo (2008: 367) Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut andil secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara memilih kepala negara dan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik merupakan hal yang sangat fundamental bagi Indonesia, karena masyarakat yang ikut secara aktif dan andil dalam Partisipasi politik tersebut sehingga menghasilkan suatu hal yang menyejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara di kemudian hari. Ketika pemimpin yang dipilih hanya mengutamakan kepentingan diri dan golongannya sendiri, buah dari partisipasi politik masyarakat ini justru dapat menyengsarakan dan membuat sulit kehidupan bernegara dikemudian hari.

Aparatur desa menjadi wadah aspirasi masyarakat daerah setempat untuk kebaikan serta kepentingan daerahnya itu sendiri. Selain sebagai wadah aspirasi, aparatur desa wajib menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, karena jalannya suatu desa adalah hasil dari kinerja aparatur desa itu sendiri. Aparatur desa ini terdiri kepala desa, sekretaris desa serta jajaran kepala urusan baik itu urusan umum, urusan keuangan dan urusan pemerintahan serta pelayanan. Selain menjadi wadah aspirasi masyarakat desa serta sebagai penggerak pemerintahan di desa itu sendiri, setiap aparatur desa harus melaksanakan pengajaran berupa pentingnya ikut berpartisipasi dalam setiap memilih bakal calon kepala desa kedepannya. Sehingga pengajaran serta sosialisasi yang dilakukan aparatur desa menambah minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.

Dilansir dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 1 yang berbunyi “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat”. Pemilihan Kepala Desa ini menjadi suatu *momentum* yang dapat digunakan sebagai sarana serta wadah dari kepentingan berbagai kalangan masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang dapat memenuhi seluruh kepentingan dari masyarakat tersebut. Sehingga Aparatur Desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan salah satu perannya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan cara melaksanakan sosialisasi dan pengajaran akan pentingnya berpartisipasi dalam politik.

Korelasi Aparatur Desa dengan Partisipasi Politik adalah selaras dengan konsep demokrasi. Yang dimana demokrasi merupakan pemerintahan yang

berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Partisipasi politik adalah usaha yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok yang ikut andil secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, salah satunya yaitu berpartisipasi dalam politik, Jadi partisipasi politik akan berjalan dengan sebagaimana mestinya jika partisipasi yang dilakukan oleh rakyat dalam hal ini masyarakat memiliki keinginan untuk mengikuti. Semakin peran yang dilaksanakan Aparatur Desa untuk meningkatkan Partisipasi Politik dilakukan dengan baik, maka *output* yang dihasilkan adalah meningkatkannya jumlah partisipan yang dibutuhkan dalam system demokrasi di Indonesia.

Partisipan atau orang yang boleh memilih dalam pemilihan umum ini tentu saja yang sudah berumur 17 tahun. Pemilih dengan kategori ini disebut dengan pemilih pemula, pemilih pemula erat kaitannya dengan nuansa “baru” dan belum mengenal lebih jauh bagaimana cara untuk menjadi partisipan yang baik, netral, jujur serta tidak mudah terbawa oleh salah satu kepentingan kelompok tertentu. Pengetahuan akan partisipasi politik yang baik bisa diperoleh dengan pengalaman yang dimiliki dan peran yang dilakukan aparatur desa setempat akan pentingnya untuk mengikuti setiap kegiatan yang berhubungan dengan partisipasi politik. Ini membuat pemilih pemula menjadi suatu hal yang unik, karena partisipasi pemula ini merupakan orang “baru” dalam tatanan partisipasi politik di Indonesia.

Desa Cipeuyeum adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, yang warga masyarakatnya sangat kental sekali dengan budaya kedaerahan. Dan memiliki jumlah penduduk dengan tingkat Pendidikan Sekolah Dasar tertinggi dibandingkan beberapa Desa yang ada di Kecamatan Haurwangi. Ini membuktikan bahwasannya Desa Cipeuyeum sangat terbelakang akan Pendidikan yang tinggi sehingga berdampak kepada wawasan serta pengetahuannya yang terbatas soal partisipasi politik. Bentuk dari pelaksanaan partisipasi politik itu sendiri adalah diselenggarakannya momentum Pemilihan Kepala Desa. Di Desa Cipeuyeum itu sendiri, pemilihan kepala desa menjadi momentum akan terpilihnya figur yang baik untuk memimpin jalannya suatu pemerintahan. Desa cipeuyeum memiliki jumlah penduduk 6.149 dan tempat

dilaksanakan pemilihan kepala desa tersebut di lima TPS yang tersebar di sekitar Desa Cipeuyeum, diantaranya TPS 1 berada di Kampung Mareng, TPS 2 berada di Kampung Mareng RT 02, TPS 3 di Kampung Nyalindung, TPS 4 di Kampung Babakan Jati, TPS 5 di Kampung Cisaar. Pemilihan kepala desa di Desa Cipeuyeum mengusung lima calon tunggal, diantaranya Drs. Acil Sutrisno, Drs. Entis Sutisna, Gugun Gunawan, H. Hendra dan Iyan K. Dan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT dilansir dari data Desa Cipeuyeum berjumlah 4.200 orang.

Desa Cipeuyeum berbatasan dengan 4 (empat) wilayah yang berada dalam satu ruang lingkup Kecamatan Haurwangi, diantaranya Desa Kertamukti, Desa Gunung Sari, Desa Mekarwangi dan Kecamatan Haurwangi itu sendiri. Desa Cipeuyeum ini menarik untuk diteliti karena selain dari masyarakatnya memiliki jumlah Pendidikan Sekolah Dasar terbanyak dibandingkan Desa lain yang berada di Kecamatan Haurwangi juga di Desa Cipeuyeum itu sendiri, jumlah pemilih pemula lulusan Sekolah Dasar memiliki partisipasi terbanyak sehingga menjadi suatu tantangan bagi Aparatur Desa Cipeuyeum itu sendiri untuk bagaimana cara meningkatkan partisipasi politik dari pemilih pemula Lulusan Sekolah Dasar di Desa Cipeuyeum, apakah memiliki kesamaan dengan cara yang dilakukan Aparatur Desa di Desa Kertamukti, Desa Mekarwangi, Desa Gunungsari dan Kecamatan Haurwangi atau memiliki cara tersendiri untuk meningkatkan partisipasi tersebut.

1). Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Kertamukti

Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Kertamukti, dilansir dari data Desa Kertamukti, Desa Kertamukti mengencarkan pertumbuhan dan partisipasi politik dari masyarakat Desa dengan 4 hal pokok penting, diantaranya Produk Kawasan Desa, Embung Desa, Bumdes dan Sarana Olahraga Desa. Yang dimana pemanfaatan sarana olahraga desa seperti membangun lapangan badminton dan sarana olahraga lain yang secara tidak langsung meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Desa Kertamukti sehingga menimbulkan *feedback* dari Pemilih Pemula

di Desa Kertamukti tersebut yang memiliki anggapan bahwa mereka merasa dipentingkan dan sarana yang mereka perlukan dibangun.

2). Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Haurwangi

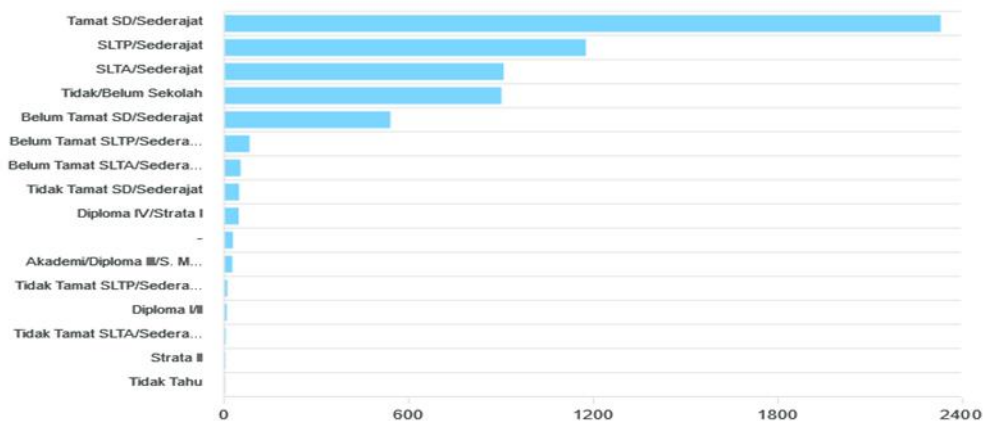
Partisipasi Pemilih Pemula di Kecamatan Haurwangi, dilansir dari [jabarexpres.com](http://jabarexpres.com) Pemerintah Desa Kecamatan Haurwangi meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dengan cara menerapkan MoU atau *Memorandum of Understanding* yang dimana MoU ini penting dilakukan berbarengan dengan Pendidikan Politik yang dilaksanakan di setiap sekolah SMA yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik dari kalangan pemilih pemula (Zela, 2022).

3). Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Mekarwangi

Desa Mekarwangi meningkatkan partisipasi dari pemilih pemula selain dari menerapkan pendidikan politik juga memanfaatkan sektor UMKM Penjualan Kopi yang dilakukan pemuda di Desa Mekarwangi. Selain menumbuhkan dan mengikutsertakan keaktifan pemuda di Desa Mekarwangi, juga membantu meningkatkan pertumbuhan di berbagai sector yang ada di Desa Mekarwangi, yaitu partisipasi politik dari pemilih pemula itu sendiri (Nandang, 2019).

4). Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Gunungsari

Desa Gunungsari berdekatan dengan Desa Cipeuyeum, yang kondisi dari pemilih pemulanya itu sendiri di dominasi oleh Pendidikan SMA. Karena dengan tingkat pendidikan yang mereka tempuh, memiliki pengaruh terhadap wawasan, pengetahuan dan rasa ingin “merubah” kondisi dari masyarakatnya tersebut dengan cara memilih Kepala Desa yang baik (Arifin, 2023).



**Gambar 1. 1 Pendidikan Masyarakat Desa Cipeuyeum pada Pilkadaes 2019**

Dari gambar diatas, Pendidikan sekolah dasar dimiliki masyarakat Desa Cipeuyeum dengan jumlah 2334 orang, diikuti oleh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah 1778 orang, Pendidikan Sekolah Menengah Atas berjumlah 910 orang, Pendidikan diploma 34 orang dan Pendidikan srata 1 berjumlah 47 orang. yang dijumlahkan menjadi 4.503 orang yang menempuh tingkat pendidikan. Sebanyak 1.646 masyarakat terbagi ke dalam beberapa diantaranya yang masih belum tamat SD, SMP dan SMA.

**Tabel 1. 1 Pendidikan Pemilih Pemula Di Desa Cipeuyeum pada Pilkadaes 2019**

SD	SMP	SMA	Diploma	S1
20 Orang	14 Orang	11 Orang	9 Orang	2 Orang

Dilansir dari data Desa Cipeuyeum, jumlah pemilih pemula yang mengikuti pemilihan kepala desa di desa cipeuyeum ini berjumlah 56 orang, dengan partisipan terbanyak dimiliki oleh Pendidikan Sekolah Dasar dengan jumlah 20 orang atau sekitar 11.2% dari total jumlah Pendidikan pemilih pemula yang berpartisipasi. Namun setelah dilakukan pendataan oleh Aparatur Desa setempat, dari 20 orang tersebut hanya 8 orang atau sekitar 4.48% yang akan mengikuti pemilihan kepala desa. Dengan adanya peran yang dilakukan aparatur desa,

diharapkan pemilih pemula lulusan sekolah dasar ini semuanya mengikuti jalannya pemilihan kepala desa di Desa Cipeuyeum pada tahun 2019.

Oleh karena itu, topik ini menjadi menarik untuk dikaji dan diangkat menjadi skripsi mengenai peran yang dilakukan oleh Aparatur Desa dalam upayanya meningkatkan Partisipasi Politik dari pemilih pemula Lulusan Sekolah Dasar yang notabeneanya memiliki pengetahuan serta wawasan yang terbatas tentang apa itu partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Cipeuyeum tahun 2019. **“Peran Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Lulusan SD Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Cipeuyeum Tahun 2019”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa peran yang dilakukan aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula lulusan SD di Desa Cipeuyeum pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 ?
2. Bagaimana strategi aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula lulusan SD pada pemilihan kepala desa di Desa Cipeuyeum pada tahun 2019 ?
3. Bagaimana dampak, hambatan dan Aparatur Desa Cipeuyeum dalam meningkatkan partisipasi politik ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula lulusan SD pada pemilihan kepala desa di Desa Cipeuyeum pada tahun 2019.
2. Untuk mengetahui strategi yang dihadapi aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula lulusan SD pada pemilihan kepala desa di Desa Cipeuyeum pada tahun 2019.
3. Untuk mengetahui dampak, hambatan dan tantangan Aparatu Desa Cipeuyeum tentang partisipasi politik.



#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah dan mengetahui seberapa pentingnya peran aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula lulusan sd.
2. Manfaat Praktisi, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai bagi setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti dosen, peneliti serta mahasiswa dan bisa dijadikan sumber bahkan referensi untuk kebutuhan literature di masa yang akan datang.

#### E. Kerangka Berpikir

Tabel 1. 2 Kerangka Bepikir



Gambar di atas merupakan kerangka berpikir penelitian penulis. Dari gambar di atas, termuat beberapa struktur yang menjelaskan landasan dari kerangka berpikir penelitian. Dimulai dari aparatur desa, aparatur desa adalah aspek penting yang dilakukan oleh setiap aparatur serta kepegawaian yang ada di desa dengan tujuan untuk mencapai kepentingan serta kemajuan desanya itu sendiri (Handayani, 1980). Fungsi yang dimiliki aparatur desa tersebut adalah memberikan pengajaran serta bantuan kepada masyarakat daerah setempat, menjalankan serta menggerakkan partisipasi yang dilakukan masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih serta memilih suatu hal (Ndraha, 1190). Jika melihat dari fungsi yang dimiliki oleh aparatur desa ini yaitu soal menggerakkan partisipasi masyarakat ini selaras dengan konsep demokrasi yang dimana partisipasi yang dilakukan masyarakat ini menjadi hal



yang sangat penting dilakukan, karena semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, maka semakin banyak pula suara masyarakat yang mempengaruhi kemajuan desa tersebut.

Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan warga negara (*private citizen*) dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintah dalam suatu pengambilan keputusan (Huntington dan Nelson, 1994: 5). Berdasarkan pengertian tersebut, partisipasi politik merupakan suatu cara yang diambil masyarakat, baik itu ikut memilih dalam pemilihan umum sehingga partisipasi yang dilakukan mempengaruhi kondisi suatu negara di masa yang akan datang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula yaitu kondisi geografis dan tingkat ekonomi (Arwiyah, 2012). Menurut Ramlan Surbakti (2010) faktor yang mempengaruhi pemilih dalam berpartisipasi diantaranya kesadaran akan berpolitik, rasa percaya yang dimiliki masyarakat kepada pemerintah, kondisi sosial serta ekonomi.

Faktor pendorong pemilih pemula dalam partisipasi politik adalah motivasi untuk ikut dalam partisipasi politik dan kampanye politik. Contohnya seperti ikut memilih dalam kegiatan pemilu atau pilkades untuk pertama kali, karena hendak merasakan *euphoria* dalam memilih suatu pasangan calon. Kampanye politik membuat partisipasi pemula ikut serta dalam pemilihan umum (Fenyapwain, 2013). Iklan politik yang diterima baik itu di media sosial maupun baliho yang berisi tentang kampanye pasangan calon membuat pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam politik.

Widhiastini, et.al. (2018) menjelaskan bahwa faktor penghambat pemilih pemula dalam partisipasi politik adalah kurangnya pengetahuan dan motivasi mengikuti pemilihan umum. Kondisi geografis menjadi penghambat kepada partisipasi pemula (Payapo, et.al., 2014). Kondisi geografis ini terbagi ke dalam sarana dan prasarana. Yang termasuk sarana dalam pelaksanaan pemilu seperti ketersediaan kotak suara, surat suara dan bilik pemungutan suara. Tempat pemungutan suara menjadi prasarana dalam pemilihan umum, karena jika tempat

pemungutan suara memiliki kondisi strategis dan dapat dijangkau akan memudahkan pemilih pemula untuk ikut serta dalam partisipasi politik,

Pemilih pemula jika dikaitkan dalam hal politik adalah sekelompok orang yang pertama kali menggunakan suara serta hak pilihnya dalam ruang lingkup pemilu (Setiajid, 2011). Pemilih pemula ini juga bisa dikategorikan kepada pemilih yang sudah berusia 17 tahun dan sudah memiliki kartu tanda penduduk. Peran yang dilakukan pemilih pemula dalam ruang lingkup politik adalah melakukan fungsi *controlling* terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika pemilih pemula bahkan masyarakat melakukan *controlling* ini dilakukan, maka pemerintah ketika membuat dan menetapkan kebijakan harus berdasarkan kepentingan Bersama diatas kepentingan pribadinya saja

Sekolah Dasar mengajarkan Pendidikan karakter kepada siswanya. Pendidikan karakter merupakan fondasi awal seseorang untuk memilih mana yang baik dan buruk untuk diterapkan di kehidupannya sehari-hari, yang dimana setiap orang tua, sekolah, organisasi yang ada di masyarakat dan bahkan lembaga agama sekalipun wajib untuk menumbuhkan karakter dan moral kepada siswa (Krischenbaum, 1995: 3). Sekolah dasar menjadi langkah awal dan bekal setiap individu untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pemilihan kepala desa tahun 2019 yang dilaksanakan di Desa Cipeuyeum ini menjadi momentum dalam memilih suatu *figure* yang baik, amanah serta bertanggung jawab. Lulusan SD menjadi partisipan terbanyak dibandingkan jenjang Pendidikan yang lain. Ini membuktikan bahwasannya tingkat pendidikan yang masyarakat tempuh tidak memiliki keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik menurut Milbarth dan Goel dalam bukunya *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?* (1965) di dalam bukunya dijelaskan bahwasannya untuk meningkatkan partisipasi politik dibutuhkan suatu rangsangan politik dalam hal ini dapat dikaitkan dengan peran yang dilakukan Peran Aparatur

Desa dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula lulusan sekolah dasar.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya aparaturnya desa memiliki peranan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula lulusan SD pada pemilihan kepala desa di Desa Cipeuyeum pada tahun 2019. Teori yang digunakan adalah teori partisipasi politik Milbarth dan Goel sehingga peran yang dilakukan aparaturnya desa ini membuat partisipasi politik lulusan SD meningkat dan selaras dengan konsep demokrasi yang dimana masyarakat dengan seluas-luasnya dapat ikut memilih untuk menentukan nasib bangsanya dikemudian hari.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

